



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 5 Maret 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

UNIT KERJA : DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **WAHYU AGUST PRATAMA**
2. Jabatan : **KEPALA BIDANG**
3. NHK : **646988**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp. 1.849.300.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 500 m2/432 m2 di KAB / KOTA KOTA PALU , WARISAN Rp. 350.000.000
2. Tanah Seluas 1.062 m2 di KAB / KOTA KOTA PALU , WARISAN Rp. 159.300.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 835 m2/490 m2 di KAB / KOTA KOTA PALU , WARISAN Rp. 450.000.000
4. Tanah Seluas 1.974 m2 di KAB / KOTA DONGGALA, HASIL SENDIRI Rp. 50.000.000
5. Tanah Seluas 699 m2 di KAB / KOTA KOTA PALU , HASIL SENDIRI Rp. 104.000.000
6. Tanah Seluas 240 m2 di KAB / KOTA KOTA PALU , HASIL SENDIRI Rp. 36.000.000
7. Tanah Seluas 1.063 m2 di KAB / KOTA KOTA PALU , Rp. 100.000.000
8. Tanah Seluas 7.666 m2 di KAB / KOTA DONGGALA, HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000
9. Tanah Seluas 835 m2 di KAB / KOTA KOTA PALU , HASIL SENDIRI Rp. 250.000.000
10. Tanah Seluas 1.811 m2 di KAB / KOTA KOTA PALU , HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN**

Rp. 230.000.000

1. MOBIL, TOYOTA RUSH 1,5 G Tahun 2010, HASIL SENDIRI Rp.
130.000.000
2. MOBIL, NISSAN TERRANO MOBIL PENUMPANG/MINIBUS Tahun
2004, HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA

Rp. 50.000.000

D. SURAT BERHARGA

Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS

Rp. 592.726.648

F. HARTA LAINNYA

Rp. ----

Sub Total

Rp. 2.722.026.648

III. HUTANG

Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 2.722.026.648

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.